

ABSTRAK

Virtual Private Network (VPN) merupakan peranti atau perangkat ketiga yang tersedia di berbagai alat elektronik seperti *handphone*, komputer, dan lain sebagainya. VPN memberikan fitur terhadap pengguna alat elektronik dan pengguna internet untuk menyelami *server* internet yang tidak tersedia di negaranya. VPN pada dasarnya memberikan kemudahan untuk pengguna internet dalam memasuki situs – situs yang tidak dapat di akses di negaranya. Sehingga memberikan celah untuk pengguna internet dalam melakukan aktivitas yang ilegal oleh para pengguna internet. Permasalahan muncul ketika pemerintah telah menerapkan kebijakan Internet Positif yang kemudian berganti menjadi Trust+Positif untuk menutup akses dari situs – situs yang dinilai ilegal oleh undang – undang. Tetapi dengan adanya VPN, pengguna internet mampu memasuki kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dibantu dengan pendekatan undang – undang atau *statute approach* untuk menganalisis hukumnya. Hasil dari penelitian ini adalah, pada dasarnya mengakali sistem kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah melanggar ketentuan undang – undang dikarenakan dampak negatif yang diperoleh dari perbuatan tersebut. UU ITE telah mengatur bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana hanya saja masih menjadi celah jikalau perbuatan tersebut tidak disebutkan dengan spesifik. Perbuatan menyalahgunakan VPN termasuk ke dalam tindak pidana siber penerobosan masuk tanpa izin melihat dari penafsiran hukum yang memperkuat tingkat hukuman dari perbuatan tersebut. Sehingga, menilai dari dampak utama dari penyalahgunaan tersebut, perbuatan mengakses situs ilegal yang telah diblokir oleh pemerintah termasuk dalam perbuatan tindak pidana.

Kata kunci: VPN – penyalahgunaan – kebijakan

ABSTRACT

A Virtual Private Network (VPN) is a third-party tool available on various electronic devices such as mobile phones, computers, and so on. VPNs provide features for electronic device users and internet users to explore internet servers that are not available in their country. VPNs essentially make it easier for internet users to access sites that cannot be accessed in their country. This creates a loophole for internet users to engage in illegal activities by internet users. Problems arose when the government implemented the Positive Internet policy, which was later changed to Trust + Positive, to block access to sites deemed illegal by law. However, with a VPN, internet users are able to enter areas that are prohibited by the government. The research method used is a normative research method. Assisted by a statute approach to analyze the law. The results of this study are that, essentially, circumventing the policy system that has been implemented by the government violates the provisions of the law due to the negative impacts obtained from such actions. The ITE Law has stipulated that such actions are included in criminal acts, but there are still loopholes if the actions are not specifically stated. Misusing a VPN falls under the cybercrime of unauthorized entry, based on legal interpretations that increase the severity of the penalties. Therefore, judging by the primary impact of this misuse, accessing illegal websites blocked by the government is considered a criminal offense.

Keywords: VPN – misuse – policy